

IMPLEMENTASI PERMENKES NO.8 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PADA PUSKESMAS KENTEN PALEMBANG

OLEH :

SERLIANA : 19.11.274

PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA

ABSTRACT

Serliana, 2023, Implementation of Permenkes No. 8 2019 about society empowerment in health sector at Puskesmas Kenten Palembang, State administration major at Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara (STIA) Satya Negara Palembang. Main Advisor (I) Mrs Rohmial, S.E.,M.Si and Assitant Advisor (II) Mr Ir.H.Mansyur Husin,M.Si.

Process service and society needs specially for pregnant mother, toodler, or children in helath case always be main concern in health management. Highest death case and newborn become main factor why need to understand what kind of service form in society empowerment in health sector specially for pregnant mother and toodler.

Base of study result, we know that Puskesmas Kenten Palembang also good and corrective in organize society empowerment in health sector specially for pregnant mother and toodler activities. Also knowledge, public awarness, developing organization, SDM potential utilization, partnership advocacy, and program suitability of society needs can good implemented in communication, resource, dispotition ,dan birocration structure become main point in process of Implementation of Permenkes No. 8 2019 about society empowerment in health sector at Puskesmas Kenten Palembang

Keywords: implementation, service, healthy, empowerment

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi dan sekaligus sebagai investasi, sehingga perlu diupayakan, diperjuangkan dan ditingkatkan oleh setiap individu dan oleh seluruh komponen bangsa, agar masyarakat dapat menikmati hidup sehat, dan pada akhirnya dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas merupakan modal utama atau investasi dalam pembangunan kesehatan.

Berdasarkan hasil observasi, Kesehatan ibu dan anak merupakan masalah kesehatan masyarakat yang utama di Indonesia. Perkiraan angka kematian ibu dan anak di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan data tahun 2022 di badan Komunikasi Kesehatan masyarakat (KESMAS) mencapai 32 kasus kematian ibu, 145 kasus kematian bayi baru lahir dan 166 kasus kematian bayi . Beberapa faktor yang berkontribusi terhadapnya adalah akses yang buruk ke perawatan kesehatan dan kurangnya penyedia pelayanan kesehatan di masyarakat.

Angka kematian yang tinggi tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor risiko yang terjadi sejak fase sebelum hamil. .Salah satu bentuk upaya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan adalah menumbuh kembangkan Puskesmas.

Puskesmas dengan berbagai programnya mempunyai peranan penting dalam mencegah peningkatan angka kematian ibu dan bayi.Puskesmas adalah salah satu bentuk upaya kesehatan berbasis masyarakat yang sudah menjadi milik masyarakat serta menyatu dalam kehidupan dan budaya masyarakat

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang maka penulis mengambil rumusan masalah yaitu, bagaimanakah Implementasi Permenkes No.8 Tahun 2019 tentang pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan terhadap Pelayanan Ibu Hamil dan Balita Di Puskesmas Kenten Palembang.

3. Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan penulisan Jurnal untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana Implementasi Permenkes No.8 Tahun 2019 tentang pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan pada puskesmas kenten Palembang.

Adapun Manfaat penulisan jurnal ini adalah :

1. Bagi Penulis

Untuk menambah pengalaman dan pengetahuan bagaimana Implementasi Permenkes No.8 Tahun 2019 tentang

pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan pada puskesmas kenten Palembang.

2. Bagi Masyarakat khususnya ibu hamil dan balita

Untuk menunjang tingkat pelayanan dan pengetahuan ibu hamil dan balita serta masyarakat tentang pelayanan Puskesmas yang baik dan efektif sesuai dengan PERMENKES No.8 Tahun 2019.

3. Bagi Puskesmas Kenten Palembang

Semoga apa yang di lakukan penulis laporan ini dapat di jadikan acuan dalam memberikan pelayanan yang optimal sesuai peraturan yang berlaku bagi Puskesmas Kenten Palembang.

4. Bagi STIA Satya Negara

Semoga menjadi sarana dan referensi bahan kajian serta perbandingan bagi Dosen dan Mahasiswa STIA Satya Negara Palembang di masa mendatang. Juga sebagai ilmu untuk menambah wawasan administrasi mahasiswa mengingat betapa besarnya peranan staf administrasi dalam mendukung suatu organisasi dalam mencapai tujuan.

B. LANDASAN TEORI

1. Pelayanan

Pelayanan dapat berarti suatu rangkaian dari aktivitas/kegiatan untuk melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain atau masyarakat, baik yang bersifat dapat diraba maupun yang bersifat tidak dapat diraba yang diberikan oleh unsur pemberi pelayanan (pemerintah) kepada unsur penerima pelayanan yakni masyarakat. Atau pengertian pelayanan lainnya adalah suatu aktivitas/manfaat yang ditawarkan oleh unsur organisasi atau perorangan kepada unsur konsumen (yang layani), yang bersifat tidak berwujud.

Pelayanan publik menurut Subarsono dalam Dwiyanto (2008;136), adalah pelayanan publik merupakan suatu produk dari birokrasi publik yang selalu diterima oleh warga masyarakat sebagai unsur pengguna pelayanan maupun oleh masyarakat secara luas. Karena itu, pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai suatu serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh lembaga birokrasi publik untuk memenuhi segala bentuk kebutuhan dari warga pengguna.

2. Pengertian Implementasi

Implementasi secara umum ialah pelaksanaan atau penerapan. Suatu pelaksanaan yang sudah dirancang secara matang dan sudah tersusun. Implementasi dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok agar tercapainya penerapan suatu sistem perencanaan yang baik dan juga sistematis.

Dalam rangka mendukung pembuatan penelitian diperlukan dan dijelaskan teori-teori yang berkaitan dengan ruang lingkup pembahasan serta permasalahan sebagai landasan teori secara ilmiah untuk mendapatkan data.

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, jadi implementasi dilakukan jika sudah ada perencanaan yang baik dan matang, atau sebuah rencana yang telah disusun jauh-jauh hari sebelumnya, sehingga sudah ada kepastian dan kejelasan akan rencana tersebut. Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan.

Jadi implementasi dimaksudkan sebagai tindakan individu publik yang diarahkan pada tujuan, serta ditetapkan dalam keputusan dan memastikan terlaksanakannya dan tercapainya suatu kebijakan serta memberikan hasil yang baik dan bersifat praktis terhadap sesama. Sehingga dapat tercapainya sebuah kebijakan yang memberikan hasil-hasil terhadap tindakan-tindakan individu publik atau swasta. Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang kompleks.

Berdasarkan pengertian diatas dapat dikatakan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan yang dilakukan pihak-pihak yang berwenang atau kepentingan baik pemerintah maupun swasta, yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita yang ditetapkan.

Model Implementasi Kebijakan

Menurut Morilee S. Grindle dalam (Leo Agustino 1990:74), menjelaskan bahwa implementasi kebijakan memiliki beberapa macam model implementasi. Dalam hal model implementasi yang digunakan ialah model menurut Morilee S. Grindle (1990:74).

1. Model Implementasi Merille S. Grindle

Model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Grindle, (1990:74) mengatakan bahwa proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula telah diperinci, program-program aksi telah dirancang dan jumlah dana telah dialokasikan

untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran tersebut. Selain itu implementasi Grindle juga dipengaruhi oleh Content of Policy (isi kebijakan) dan *Context of Implementation* (konteks implementasinya). Isi kebijakan yang dimaksud meliputi Kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan, jenis manfaat yang dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, para pelaksana program, dan sumber daya yang dikerahkan. Sedangkan konteks implementasi yang dimaksud yaitu : Kekuasaan, kepentingan strategi aktor yang terlibat, karakter lembaga dan penguasa, serta kepatuhan dan daya tanggap pelaksana.

2. Model Implementasi George C. Edwards III

George C. Edwards III dikutip Widodo (2010:96), menyebutkan implementasi kebijakan dipengaruhi 4 variabel, yaitu :

- Komunikasi**
Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa saja yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada personel-personel yang tepat sebelum dilaksanakan. Komunikasi semacam ini harus akurat dan harus dipahami oleh para pelaksana.
- Sumber Daya**
Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia, yakni implementor dan sumber daya finansial.
- Disposisi atau Sikap-Sikap**
Adalah watak karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sikap demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka akan dapat yang diinginkan pembuat kebijakan.
- Struktur Birokrasi**
Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi standar (*Standart Operating Procedure* = SOP). SOP menjadi pedoman bagi implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red tape, yaitu prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

3. Model Implementasi Mazmania dan Sabatier (1983)

Mazmania dan Sabatier dalam Subarsono, (2005:70) menjelaskan bahwa ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi kebersihan implementasi, yaitu :

- Karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), indikatornya
 - Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan
 - Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran
 - Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi
 - Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan
- Karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*), indikatornya :
 - Kejelasan isi kebijakan
 - Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis
 - Besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan tersebut
 - Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana
 - Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana
 - Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan
 - Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan
- Variabel lingkungan (*nonstature variables affecting implementation*), indikatornya :
 - Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi
 - Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan
 - Sikap dari kelompok pemilih (*constituent groups*)
 - Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.

4. Model Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Van Meter dan Van Horn (dalam Subarsono 2005) menjelaskan bahwa ada 6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

- Standar dan sasaran kebijakan**
Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang dapat menyebabkan terjadinya konflik diantara para agen implementasi.

- b. Sumber daya
Kebijakan perlu didukung oleh sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumberdaya non manusia.
- c. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas
Dalam berbagai kasus, implementasi sebuah program terkadang perlu didukung dan dikoordinasikan dengan instansi lain agar tercapai keberhasilan yang diinginkan.
- d. Karakteristik agen pelaksana
Sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan dukungan bagi implementasi kebijakan. Termasuk didalamnya karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak, dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.
- e. Kondisi sosial ekonomi dan politik
Kondisi sosial, ekonomi dan politik mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.
- f. Disposisi implementor
Disposisi implementor mencakup tiga hal penting, yaitu:
 1. Respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan
 2. Kognisi, yaitu pemahamannya terhadap kebijakan
 3. Intensitas disposisi implementor yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Tujuan Implementasi

Berikut ini terdapat beberapa tujuan implementasi, antara lain:

1. Tujuan utama implementasi adalah untuk melaksanakan rencana yang telah disusun dengan cermat, baik oleh individu maupun kelompok.
2. Untuk menguji serta mendokumentasikan suatu prosedur dalam penerapan rencana atau kebijaka.
3. Untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai di dalam perencanaan atau kebijakan yang telah dirancang.
4. Untuk mengetahui kemampuan masyarakat dalam menerapkan suatu kebijakan atau rencana sesuai dengan yang diharapkan.
5. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu kebijakan atau rencana yang telah dirancang demi perbaikan atau peningkatan mutu.

C. PROSEDUR PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Kualitatif. Menurut Sugiyono (2019:15) metode penelitian yaitu digunakan untuk meneliti pada kondisi objek ilmiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci. Dalam hal ini yang dimaksud peneliti mengadakan penelitian secara langsung ke objek penelitian yang sudah ditentukan agar dapat melihat dan mengamati secara langsung masalah-masalah yang diteliti.

Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti dimana semuanya tidak diukur dengan angka. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah alat penelitian yang utama.

Tempat dan waktu penelitian

Tempat penelitian ini adalah di Puskesmas Kerten Palembang. Waktu penelitian ini direncanakan selama 3 Bulan (April 2023 – Juni 2023) terhitung sejak proposal penelitian diseminarkan dilanjutkan dengan penulisan skripsi sampai dengan ujian Komprehensif.

Rancangan Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif naturalistik dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan memberikan gambaran secara sistematis tentang keadaan yang sedang berlangsung pada objek peneliti yaitu Implementasi Permenkes No.8 Tahun 2019 tentang pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan terhadap Pelayanan Ibu Hamil dan Balita Di Puskesmas Kerten Palembang.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian berjumlah 4 orang sebagai informan, sebagai berikut :

1. Kepala Puskesmas Kerten Palembang yaitu ibu Dr. Herawaty.
2. Ketua Pelayanan KIA dan KB, ibu Hj. Dwi Opan K., A.M Keb
3. Ibu Hamil yaitu ibu Rusmiati usia 28 Tahun dari Kelurahan Duku Palembang.
4. Masyarakat yang mendapat program pemberdayaan kesehatan di kelurahannya.

No	Nama	Keterangan
1	Kepala Puskesmas	1
2	Ketua Pelayanan KIA,KB dan Imunisasi	1
3	Ibu Hamil	1
4	Masyarakat	1
Jumlah		4 Orang

Definisi Konsep

Definisi konsep menurut Singarimbun, (2010:3) Merupakan istilah yang digunakan menggambarkan secara abstrak kejadian keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian sosial.

Konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generasional dari sejumlah karakteristik kejadian keadaan kelompok atau individu tertentu. Dengan adanya konsep, seseorang peneliti diharapkan dapat menggunakan suatu istilah untuk beberapa kejadian yang saling berkaitan.

Adapun konsep dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi yaitu pelaksanaan penerapan. Pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci.
2. Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dimana berarti pengabdian atau kegiatan dari lembaga pemerintah atau kesehatan untuk mensejahterakan lingkungan yang ada terutama yang berkaitan langsung terhadap kesehatan masyarakat di lingkungan tersebut.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendukung penelitian yang peneliti teliti, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

1. Observasi

Teknik dalam penelitian ini dilakukan dengan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan, mengumpulkan data ketika kegiatan dilakukan, dan datang lebih dekat untuk meliput seluruh kegiatan pada Posyandu Harum Sari RT.01/RW.05 Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti pada tanggal 5 Maret 2014 di posyandu Harum Sari, para kader posyandu melaksanakan pelayanan kesehatan kepada pengunjung posyandu, antara lain penimbangan berat badan, penentuan status tumbuh kembang, pemberian vitamin dan pemberian makanan tambahan.

2. Wawancara

Dalam penelitian ini, dilakukan dengan mewawancarai informan penelitian sebanyak 5 orang yaitu dua orang informan inti, dua orang informan kontrol dan satu orang informan pengamat.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah suatu penelaahan terhadap beberapa dokumen yang ada kaitannya dengan masalah penelitian. Teknik penelaahan dokumentasi dilakukan oleh peneliti untuk melakukan kontak dengan pelaku atau sebagai partisipan yang terlibat dalam suatu peristiwa sejarah masa lalu.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa intisari pembahasan tentang proses implementasi berdasarkan teori George C. Edward III tentang indikator implementasi lalu selanjutnya dikaitkan dengan Bab II Pasal 3 Permenkes No.8 Tahun 2019 mengenai tujuan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, sebagai berikut :

Implementasi Permenkes No.8 Tahun 2019 Pada pelayanan Ibu Hamil dan Balita di Puskesmas Kenten Palembang berdasarkan Teori George C. Edward III.

Dalam hal ini berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis jabarkan sebelumnya diperoleh pemahaman sebagai berikut :

1. Komunikasi

Komunikasi dalam proses implementasi sangat berperan penting. Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan mengenai ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan dengan tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga dapat secara tepat ukuran mengenai tujuan dari kebijakan tersebut. Dalam hal ini proses komunikasi dalam kegiatan penyelenggaraan masyarakat oleh Puskesmas Kenten Palembang telah berjalan dengan baik terhadap pelayanan bagi ibu hamil dan balita. Dimana proses komunikasi dimulai dari perangkat inti sampai dengan masyarakat telah sukses dalam beberapa kegiatan yang dapat diartikan bahwa proses komunikasi telah berjalan dengan baik.

2. Sumber Daya

Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsistennya implementasi program dan bagaimana akuratnya komunikasi yang dikirim jika personil yang dikirim dan bertanggung jawab untuk melaksanakan program tersebut kekurangan sumber daya dalam melakukan tugasnya. Sumber daya yang dimaksud adalah meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan, serta fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai. Sumberdaya yang kurang baik dapat mengakibatkan program dalam pelaksanaannya terkendala. Dalam melaksanakan itu Puskesmas kenten Palembang telah mempersiapkannya dengan matang. Sumber daya baik manusia maupun fasilitas telah dengan baik menunjang kegiatan pelayanan bagi ibu hamil dan balita, terlihat dari beberapa bentuk kegiatan yang telah maksimal.

3. Disposisi

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati. Tetapi, jika pandangan mereka berbeda dari yang membuat kebijakan atau kegiatan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah karena tidak satu tujuan. Dari hasil wawancara diatas menjelaskan secara langsung bahwa arahan baik dari atas sesuai dengan visi misi Puskesmas dan rencana kegiatan serta hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan ,

dapat diketahui bahwa alur disposisi telah berjalan dengan baik.

4. Struktur Birokrasi

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan atau kegiatan tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Struktur birokrasi kegiatan Puskesmas Kenten Palembang telah berjalan dengan baik karena segala bentuk kegiatan harus dimulai dari birokrasinya yang baik dan hasil kegiatan yang telah berhasil dilakukan menunjukkan bahwa alur birokrasi telah berjalan dengan efektif dan tepat baik secara kompetensi, pengawasan, komunikasi terbuka dan lain sebagainya.

Kualitas Pelayanan Ibu Hamil dan Balita di Puskesmas Kenten Palembang Berdasarkan Bab II Pasal 3 Permenkes No.8 Tahun 2019 mengenai tujuan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan

Ada beberapa point penting pembahasan terkait dengan Bab II pasal 3 Permenkes No. 8 tahun 2019 mengenai tujuan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan terkait pelayanan bagi ibu hamil dan balita, dapat diperoleh pembahasan sebagai berikut :

1. Pengetahuan atau pemahaman

Pengetahuan atau pemahaman tentang kegiatan adalah dasar pokok dalam membentuk konsep dasar kegiatan. Hal ini harus sejalan dengan apa yang hendak direncanakan, seperti apa bentuk kegiatan, dan hasilnya pun dapat sesuai dengan apa yang diinginkan. Berdasarkan Hasil wawancara dan pengamatan langsung dapat diketahui bahwa dalam perangkat Puskesmas Kenten seperti halnya ketua, petugas pelayanan dan lain sebagainya sangat berperan aktif dalam proses kegiatan pemberdayaan yang ada. Mereka semua telah memahami dengan detail konsep serta alur pengkonsepkan bentuk kegiatan yang akan diselenggarakan terutama yang berhubungan langsung dengan kesehatan ibu hamil dan balita.

2. Kesadaran Masyarakat

Kesadaran Masyarakat merupakan kunci inti dari sukses atau tidaknya kegiatan pemberdayaan. Dan salah satu faktor penentu dari keberhasilan

kegiatan yaitu adanya keikutsertaan dari masyarakat. Keikutsertaan sendiri harus dimulai dari adanya kesadaran masyarakat. Dari hasil wawancara yang ada dari narasumber dapat diketahui bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap kegiatan dan pelayanan sudah baik dan berjalan meskipun ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan kembali mengenai bagaimana informasi bisa lebih aktif dan masif lagi kepada masyarakat.

3. Pengembangan Organisasi

Dalam pengembangan organisasi yang ada, masyarakat serta Puskesmas Kenten telah berupaya membentuk konsep organisasi kegiatan yang efektif. Keikutsertaan masyarakat terlihat dari hasil wawancara dimana setiap elemen masyarakat diberdayakan untuk ikut serta mengatasi permasalahan kesehatan yang ada.

4. Peningkatan advokasi dan kemitraan

Peran serta pemerintah, dinas kesehatan kota, dan perangkat pemerintahan setempat telah menggambarkan bagaimana advokasi terjalin dengan baik. Kemitraan juga berdasarkan dari hasil wawancara bahwa Puskesmas telah banyak bekerjasama dengan lembaga pemerintahan, sekolah, perusahaan, serta lembaga masyarakat dalam mensukseskan setiap kegiatan terutama kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung dengan ibu hamil dan balita.

5. Pemanfaatan Potensi dan SDM

Dalam setiap kegiatan berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa Puskesmas Kenten telah dengan baik dan efektif memanfaatkan potensi serta SDM yang ada dalam pelaksanaan kegiatan seperti halnya posyandu bagi ibu hamil dan balita, setiap petugas yang ada selalu dibantu oleh masyarakat sekitar dalam hal administrasi dan lain-lain.

6. Kesesuaian program / kegiatan terhadap kebutuhan masyarakat

Program-program yang ada dapat diketahui telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat terutama kegiatan bagi ibu hamil dan balita, seperti kegiatan kunjungan rumah bagi ibu hamil, kegiatan posyandu balita, pembinaan kesehatan anak panti, gerakan ibu hamil sehat, pembinaan anak di SLB (Sekolah Luar Biasa) dan masih banyak lagi. Dan seluruh program itu telah diberdayakan untuk

keberlangsungan proses masyarakat dalam hidup sehat berkelanjutan.

Berdasarkan beberapa point penting diatas dapat ditarik pemahaman bahwa secara garis besar berdasarkan indikator proses implementasi dan hubungannya dengan penerapan Permenkes No. 8 pada kualitas pelayanan bagi ibu hamil dan balita telah dijalankan dengan baik dan terstruktur. Baik dari segi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi terhadap tujuan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan yaitu pengetahuan, kesadaran masyarakat, pengembangan organisasi, kemitraan, Potensi SDM, dan kesesuaian program semuanya telah masuk dalam dijalankan dalam bentuk implementasi dengan baik.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang ada, Dapat ditarik kesimpulan dari pembahasan bahwa proses Implementasi Permenkes No. 8 Tahun 2019 tentang pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan telah berjalan dengan baik karena faktor-faktor implementasi seperti komunikasi, disposisi, sumber daya, dan struktur birokrasi telah sesuai dengan proses pelayanan bagi ibu hamil dan balita di Puskesmas Kenten Palembang. Dan implementasi peraturan itu sendiri tercermin dari persyaratan yang telah sesuai, seperti halnya pemahaman atau pengetahuan para petugas Puskesmas Kenten serta masyarakat terhadap kegiatan pemberdayaan bagi ibu hamil dan balita yang ada telah berlangsung dengan baik, kesadaran masyarakat dalam ikut serta kegiatan terutama para ibu hamil untuk turut mengikuti kegiatan agar mendapatkan pengetahuan dan pengecekan kesehatan yang baik. Selanjutnya, pengembangan organisasi dalam setiap kegiatan juga telah efektif terlihat dari bentuk kegiatan dimana proses organisasi terbentuk dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Kemitraan serta pemanfaatan potensi dan SDM juga telah berjalan baik dilihat dari kegiatan yang sukses seperti posyandu, kunjungan rumah bagi ibu hamil, pembinaan kesehatan anak panti, gerakan ibu hamil sehat, pembinaan anak di SLB (Sekolah Luar Biasa) dan masih banyak lagi. Dan itu semua sesuai dengan apa yang dibutuhkan ibu hamil dan masyarakat.

Saran

Adapun saran mengenai hasil pembahasan yang ada, penulis memberikan saran yaitu lebih diperbanyak lagi bentuk pemberdayaan masyarakat yang lebih efektif lagi kedepannya terutama buat ibu

hamil dan balita diluar dari kegiatan umum seperti posyandu, dan senam seperti halnya kegiatan Kelas edukasi kehamilan yang lebih diperbanyak lagi. Meskipun sekarang teknologi telah berkembang tapi, mendengarkan langsung dari dokter dan berkumpul dengan ibu hamil lainnya dapat menjadi ketenangan batin tersendiri bagi ibu hamil lainnya.

<http://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel-mengenal-pelayanan-publik>

F. DAFTAR PUSTAKA

Ervianingsih. 2020. *Kebijakan dan manajemen pelayanan kesehatan*. Bandung : Widina Bhakti Persada

Suhadi. 2006. *Perencanaan Puskesmas*. Jakarta : TIM media

Utomo, Priyo. 2014. *Kinerja Pelayanan publik Puskesmas*. Jakarta : Kresna bina insan prima.

Maulidiah, Sri. 2014. *Pelayanan Publik*. Bandung : Indra Prahasta

Pemerintah kota Palembang. 2019. *Pola Tata kelola puskesmas kenten*. Palembang : Dinas Kesehatan Kota Palembang.

Taufiurokhman. 2018. *Teori dan perkembangan manajemen pelayanan publik*. Tangerang : UMJ Press

M Steers, Richard. 2013. *Efektivitas Organisasi : Kaidah Tingkah Laku*. 1977: Erlangga

Priyoto. 2011. *Teori sikap dan perilaku dalam kesehatan*. Jakarta : Medical book

King Faisal, Sulaiman. 2017. *Teori Peraturan perundang-undangan dan aspek pengujiannya*. Yogyakarta: Thafa Media.

Perundang-Undangan :

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8, Tahun 2019, Tentang Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pedoman pengintegrasian Layanan Sosial dasar di Pos Pelayanan Terpadu

Undang-undang nomor 36, Tahun 2009, Tentang Kesehatan

Internet :

<http://binapemdes.kemendagri.go.id/blog/detil/575-kegiatan-puskesmas-dan-manfaatnya-bagi-ibu-dan-anak>